

Implementasi Bahasa Indonesia dalam Penyampaian Kebijakan Informasi Publik

**Difi Trenawindu Agastya, Agustin Dwi Setyowati, *Dwi Nanda Cahya Yuliani,
Alinda Rana Permata S, Jesslyn Olyvviane, Natalia Desy Anggraeni**

UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*E-mail: dwinandadncy@gmail.com

DOI: [10.61693/elhadhary.vol202.2024.1-8](https://doi.org/10.61693/elhadhary.vol202.2024.1-8)



Copyright © 2023

Diajukan: 23/06/2024

Diterima: 01/07/2024

Diterbitkan: 30/10/2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk menyampaikan informasi kebijakan kepada publik sehingga memahami apa yang pemerintah ingin lakukan untuk masyarakat, dengan penyampaian informasi yang baik dapat diikuti oleh masyarakat untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bahasa Indonesia dapat menyampaikan informasi kebijakan kepada publik, memahami dampak positif apa saja yang akan didapatkan jika menyampaikan informasi kebijakan ke publik menggunakan Bahasa Indonesia, dan mengetahui keefektifan Bahasa Indonesia untuk menyampaikan informasi kebijakan kepada publik dengan baik. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi literatur yang menggunakan beberapa referensi dari jurnal, buku, artikel atau bahan lainnya yang sekiranya kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan bahasa Indonesia secara efektif dalam memberikan informasi pemerintah sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan kemudahan akses publik ke informasi pemerintah.

Kata Kunci : Penyampaian Informasi; Kebijakan Publik; Implementasi Kehidupan

ABSTRACT

This research is motivated to convey policy information to the public so that they understand what the government wants to do for the community, with the delivery of good information that can be followed by the community to be implemented in life. The purpose of this research is to find out that Bahasa Indonesia can convey policy information to the public, understand what positive impacts will be obtained if conveying policy information to the public using Bahasa Indonesia, and find out the effectiveness of Bahasa Indonesia to convey policy information to the public properly. The method used is a qualitative approach to literature study that uses several references from journals, books, articles or other materials that are credible and accountable.

Keywords : *Delivery of Information; Public Policy; Implementation of Life.*

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang kita gunakan sehari-hari untuk

menyampaikan pesan-pesan yang mengaitkan informasi kebijakan pemerintah kepada publik. Informasi yang dibawakan menggunakan Bahasa Indonesia juga beragam mulai dari pembahasan yang sering kita lakukan di kehidupan kita hingga dari pemerintah kepada public (Gunawan & Nugraha, 2022). Menurut Kominfo (2024) Ruang publik dapat dikatakan sebagai salah satu wajah bagi Indonesia untuk memartabatkan bahasanya. Pasal 36, 37, dan 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menjadi landasan tertulis yang mengatur tentang penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik. Dalam penyampaian kebijakan dari pemerintah yang menggunakan Bahasa Indonesia tersebut membuat banyaknya masyarakat mudah untuk memahami apa yang ingin pemerintah lakukan untuk warganya. Penyampaian dengan cara yang baik dan benar, hal ini mulai diikuti oleh warga untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari dampak baik akan perlahan menyebar di kalangan warga Indonesia. Seperti yang kita semua ketahui bahwa banyak remaja atau warga Indonesia yang jarang menggunakan bahasa baku dan lebih memilih bahasa gaul dengan kesan lebih akrab. Namun, penggunaan bahasa gaul dan yang tidak sesuai kaidah kebahasaan terkadang menimbulkan miskomunikasi atau gagal paham, sebab tidak semua orang memahami kosa kata tertentu. Dengan demikian, Bahasa Indonesia menjadi bahasa kesatuan negara Indonesia dan menjadi sangat berpengaruh dalam lingkup pemerintahan dalam menyelenggarakan informasi kebijakannya kepada Masyarakat (Badriyah, S. 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Bahasa Indonesia dalam penyampaian informasi kepada publik, mengetahui dampak positif dari penggunaan Bahasa Indonesia dalam penyampaian informasi kebijakan kepada publik, memahami dampak positif yang akan didapatkan jika menyampaikan informasi kebijakan ke publik menggunakan Bahasa Indonesia, serta mengetahui keefektifan Bahasa Indonesia untuk menyampaikan informasi kebijakan kepada publik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah studi literatur yang bersifat penjelasan terhadap topik yang penulis bahas. Penelitian studi literatur di dapatkan dari data berupa jurnal. Artikel ataupun bahan literatur lainnya yang sesuai dengan topik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

* Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan suatu rencana yang telah ditentukan

sebelumnya, implementasi juga merupakan sebuah langkah nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut (Badriyah, 2021), implementasi merupakan kegiatan, tindakan, tindakan, atau mekanisme sebuah sistem yang menghasilkan adanya beberapa kegiatan, adanya kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu (Arif., et al 2020)

Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa nasional dan resmi Indonesia, sering kali menjadi bahasa yang digunakan orang Indonesia untuk komunikasi sehari-hari dan melakukan kegiatan sehari-hari juga membutuhkan bantuan dari Bahasa Indonesia. Bahasa nasional telah menjadi bahasa standar Indonesia dapat diucapkan secara formal maupun informal tergantung oleh siapa kita berbicara dan waktu kapan kita berbicara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan memiliki pengertian berupa kesatuan konsep dan prinsip yang akan berfungsi sebagai garis besar dan landasan dari rencana dapat dimulai dengan keputusan dalam bekerja, kepemimpinan, dari pengambilan keputusan itu akan menjadikan tindakan bagi kita semua atau organisasi mengenai cita-cita, tujuan, prinsip dan pedoman manajemen untuk mencapai tujuan, Sehingga dapat diartikan bahwa kebijakan adalah tindakan atau langkah yang dilakukan oleh setiap manusia mau dalam kelompok atau individu, supaya mendapatkan hal yang mereka inginkan. Kebijakan ini biasanya berbentuk aturan, pedoman, atau metode yang dirancang untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan suatu kegiatan atau masalah yang ada dalam suatu sistem.

Informasi publik seperti namanya, “publik” tentu informasi yang dapat diperoleh oleh publik dan ada juga informasi yang tidak seharusnya semua orang tahu. Informasi publik juga adalah informasi umum yang disediakan untuk umum. Penjelasan terkait keterbukaan informasi publik juga dijelaskan pada UU RI Nomor Tahun 2008. Informasi publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat berupa penyampaian kebijakan yang telah dibuat (Iradat, D. 2019)

Penggunaan Bahasa Indonesia di lingkup pemerintahan dalam penyampaian informasi kepada publik merupakan landasan penting yang mempengaruhi efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Segala aktivitas pemerintahan tidak lepas dari yang namanya komunikasi, terutama dalam penyampaian kebijakan negara. Sebagai bahasa resmi negara, Bahasa Indonesia diharapkan mampu menjadi media yang jelas, tepat, dan mudah dipahami dalam penerapannya menyampaikan berbagai informasi penting, mulai dari kebijakan publik, program pemerintah, hingga layanan masyarakat. Namun, tantangan sering muncul dalam memastikan bahwa bahasa yang digunakan tidak hanya formal dan baku, tetapi juga inklusif dan komunikatif untuk berbagai lapisan warga dengan perbedaan kehidupan

sosial juga adanya perbedaan antara pendidikan yang mereka dapatkan. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam hal-hal penyampaian informasi kepada publik dan juga pada peraturan tertulis. Dilansir dari laman situs Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pernyataan tersebut, pada 2019, tepatnya tanggal 30 September, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Di dalam Perpres itu, disimpulkan bahwa penerapan bahasa Indonesia harus mencerminkan sifat baik bukan buruk, Negara ini harus mencerminkan kriteria Bahasa Indonesia yang benar dapat dimulai dari kata ejaan, tata bahasa, dan pembentukan istilah, yang mana diatur oleh Peraturan Menteri (Chairunnisa., et al 2023)

Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor Tahun 2009, yaitu pemerintah menanggapi bahwa perlu ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Bahasa Indonesia yang digunakan oleh banyak penduduknya. Didukung juga adanya pasal 5 Peraturan Presiden yang menyatakan, “Bahasa Indonesia wajib digunakan di dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa birokrasi pemerintahan ditekankan untuk Bahasa Indonesia yang digunakan pada pidato resmi. Penggunaan Bahasa Indonesia juga diterangkan pada Perpres tersebut pada situasi-situasi yang telah disebutkan, yaitu Presiden bersama Wakil Presiden maupun pejabat negara lain telah menyampaikan bahwa bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum nasional, forum nasional yang dimaksud meliputi adanya upacara kemerdekaan, upaya resmi yang dapat dilakukan saat sidang kelembagaan, rapat penyampaian rencana anggaran negara, serta forum – forum lainnya yang bertujuan mendukung penggunaan Bahasa Indonesia.

Perpres Pasal 24 ayat (2) menekankan bahwa wajib menggunakan bahasa Indonesia melalui pelayanan publik di instansi pemerintahan. Penggunaannya antara lain pada penyampaian sistem pelayanan yang terbaik. Perpres juga mewajibkan bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar pendidikan nasional di seluruh tingkat pendidikan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa penggunaan Bahasa Indonesia sudah menjadi identitas bagi negara Indonesia dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama dalam lingkup pemerintahan. Menggunakan Bahasa Indonesia tidak sekadar soal berkomunikasi, membaca, mendengarkan, dan memahami, tetapi juga sangat penting untuk mengerti aturan dan kaidah kebahasaan yang berlaku seperti yang tercatat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ejaan yang Dibenarkan (EYD). Dalam hal ini,

kita juga mengetahui bagaimana Bahasa Indonesia digunakan dalam kehidupan pemerintahan, melihat pentingnya fungsi Bahasa Indonesia dalam segala aktivitas pemerintahan untuk menyampaikan berbagai informasi kebutuhan publik (Wibowo et al., 2021)

Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan sesuai kaidah kebahasaan dalam penyampaian informasi publik itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terkhusus bagi para mahasiswa. Dengan adanya kesadaran sejak dini, maka bahasa kita tidak akan hilang dengan begitu kita turut serta menjaga kelestarian bahasa dan budaya Indonesia.

Bagi kaum mahasiswa, setidaknya kita harus menggunakan dan melestarikan alat pemersatu kita, yang sudah ada sejak dahulu. Di sisi lain Bahasa Indonesia juga memudahkan kita untuk berkomunikasi dan mencerminkan etika sopan santun kita terhadap kepada siapa kita berbicara. Hal ini penting karena dapat membangun hubungan yang baik dan luas kepada orang lain, terkhusus pada mahasiswa yang di mana hampir setiap hari bertemu dengan mahasiswa lain, dosen-dosen ataupun orang-orang penting sehingga kita dapat menyampaikan ide-ide ataupun opini-opini dengan maksud yang jelas

Dengan belajar dan mengetahui pentingnya menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan sesuai kaidah berguna untuk kita kelak nanti, akan berguna dalam hidup jangka panjang. Di mana mampu meningkatkan cara penyampaian bahasa dengan baik dan benar, meningkatkan keterampilan menulis yang sangat penting untuk dalam pembuatan tugas-tugas yang akan kita hadapi, seperti : makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, dan skripsi. Keterampilan berbahasa yang baik menjadi salah satu kriteria dalam perekrutan pekerjaan. Dengan kemampuan berbicara, menulis, membaca, serta penyampaian bahasa yang baik dan jelas maka akan mudah disenangi orang lain ataupun atasan, sehingga kita dapat bertahan dan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada (Afizha dan Kholik, 2021)

Bahasa Indonesia memiliki banyak peran dalam mewujudkan komunikasi yang efektif. Hal ini diterapkan di berbagai bidang termasuk bidang pemerintahan. Bahasa Indonesia tidak lepas dalam hal penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah, yang disampaikan kepada publik. Selain itu bahasa Indonesia yang efektif juga berperan dalam membangun kesadaran akan isu-isu sosial, politik, dan lingkungan yang penting bagi kemajuan masyarakat melalui informasi yang diterima. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan informasi kebijakan kepada publik karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia, maka dapat membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah. Hal ini sangat efektif untuk menyampaikan informasi kepada publik yang bersifat majemuk.

Menurut Suhendar (2020) Penggunaan bahasa Indonesia secara tepat dapat mewujudkan efektivitas dalam penyampaian informasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Penyampaian informasi kebijakan kepada publik sangat penting untuk memperhatikan kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan agar informasi kebijakan dapat dengan mudah diterima oleh publik, dan menghindari adanya kesalahpahaman publik dalam menerima dan memproses informasi kebijakan yang diterima

KESIMPULAN

Bahasa Indonesia menjadi aspek yang mempengaruhi efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyampaian informasi kepada publik. Bahasa Indonesia diharapkan mampu menjadi media yang jelas, tepat, dan mudah dipahami dalam penerapannya menyampaikan berbagai informasi penting, mulai dari kebijakan negara, program pemerintah, hingga layanan masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia telah menjadi identitas bagi bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan sehari-hari dan politik, khususnya dalam ranah pemerintahan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan tepat dapat ditunjukkan pada kata bunyi, bahasa, kosa kata, ejaan, makna, dan kelogisan. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan akurat sangatlah penting.

Bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam komunikasi yang efektif, khususnya dalam memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah kepada publik. Ini juga membantu dalam mengembangkan kesadaran sosial, politik, dan lingkungan untuk manfaat masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia secara efektif dalam memberikan informasi pemerintah sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan kemudahan akses publik ke informasi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afizha, J., & Kholik, A. (2021). Penerapan Komunikasi Efektif 7C Dalam Pelayanan Informasi Publik Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta II. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 3(3), 111-125.
- Arif, D. K., Sondakh, M., & Koagouw, F. V. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi tentang penerapan UU No. 14 Tahun 2008 Di Dinas Kominfo Kota Manado). *Acta Diurna Komunikasi*, 2(4).

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. (2021, April 12). *Pemartabatan Bahasa Indonesia pada Ruang Publik*. Retrieved Mei 22, 2024, from <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/3196/pemartabatan-bahasa-indonesia-pada-ruang-publik>
- Badriyah, S. (2021). *Contoh-Contoh Teks Negosiasi dan Strukturnya*. Gramedia. Retrieved Mei 7, 2024, from <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-teks-negosiasi-dan-strukturnya/>
- Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31-45.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). In *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Keempat ed., p. 190). P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, A. I., & Nugraha, A. R. (2022). IMPLEMENTASI CYBER PUBLIC RELATIONS PEMERINTAH KOTA CIMAHI SEBAGAI MEDIA INFORMASI PUBLIK MENGENAI PANDEMI COVID-19 DALAM Mendukung E-GOVERNMENT. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(6), 1243-1258.
- Iradat, D. (2019, Oktober 9). *Kantor Pemerintah Wajib Gunakan Bahasa Indonesia*. Retrieved Mei 22, 2024, from <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/yNL7JzaK-kantor-pemerintah-wajib-gunakan-bahasa-indonesia>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019, Oktober 10). *Presiden Teken Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia*. Retrieved Mei 22, 2024, from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/22038/presiden-teken-perprespenggunaan-bahasa-indonesia/0/berita>
- Kominfo. (n.d.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK*. Retrieved June 2, 2024, from https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_9_2-Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. (2000, Mei 6). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom*. Jakarta.x
- Suhendar, A. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju

Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 13(2), 243-251.

Wibowo, Y. S., Susilowati, G., & Nugroho, R. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(7), 892-909.